

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP. NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TOMOHON**

**ANALYSIS OF READINESS APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS BASED ACCRUAL PP. NO. 71 IN 2010 THE DEPARTMENT OF REVENUE MANAGEMENT FINANCIAL AND PROPERTY OF TOMOHON CITY**

Oleh:

**Selvina Sitorus<sup>1</sup>**

**Lintje Kalangi<sup>2</sup>**

**Stanley Kho Walandouw<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail :<sup>1</sup>[selvinasitorus88@yahoo.com](mailto:selvinasitorus88@yahoo.com)

<sup>2</sup>[lintje\\_kalangi@yahoo.com](mailto:lintje_kalangi@yahoo.com)

<sup>3</sup>[stanleykho99@yahoo.com](mailto:stanleykho99@yahoo.com)

**Abstrak:** Reformasi dibidang Keuangan Negara terdapat perubahan yang signifikan yaitu perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya standar akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. PP. No. 71 tahun 2010 yang menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat dilaksanakan tahun 2015. Hal ini membutuhkan kesiapan agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat terlaksana dengan baik. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Metode analisis digunakan adalah kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, Selain itu peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sebaiknya pimpinan Kota Tomohon menyiapkan SDM yang tepat dibidang akuntansi agar hambatan-hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

**Kata kunci:** akuntansi, pemerintah, akrual.

**Abstract:** Reforms in the State Treasury that there is a significant change in accounting rule changes. This is evidenced by the issuance of government accounting standards under PP.71 of 2010 on the application of accrual-based government accounting standards. PP.71 of 2010 which confirms that the adoption of accrual accounting is carried out no later than 2015. This requires a readiness to the implementation of accrual accounting can be done well. The object of research is the Revenue Department of Finance and Regional Property Tomohon. The method used is qualitative interpretative analysis. The results of the study explained that DPPKBMD areas as financial manager Tomohon not have readiness in the application of accrual-based SAP, addition DPPKBMD role as SKPKD still have obstacles that HR placement is not appropriate educational background owned. Should the leadership of Tomohon appropriate human resources in the field of accounting so that the barriers that occur towards the implementation of accrual accounting can be minimized.

**Keywords:** accounting, government, accrual

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Reformasi di bidang Keuangan Negara terdapat perubahan yang signifikan yaitu perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan publik seperti yang dinyatakan oleh Nordiawan dan Hertianti (2010:6) yaitu tuntutan agar Pemerintah dikelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.

Perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. KSAP (2012) menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti.

Tata kelola keuangan negara pun selalu diperbaharui sebagai tanggapan pemerintah dari adanya tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu langkah pemerintah untuk peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan sistem akrual.

Penetapan SAP berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 merupakan memang salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat tata kelola keuangan negara yang baik tetapi, yang perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. Diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentunya penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten. Uraian diatas menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana persiapan DPPKBMD Daerah Kota Tomohon dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta kendala-kendala apa yang masih dihadapi selama persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana :

1. Proses persiapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.
2. Kesiapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.
3. Hambatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan tahun 2015.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pemerintahan

Halim (2007:123) menjelaskan Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain* publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya.

Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4) menjelaskan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*). Sehingga dapat disimpulkan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

### Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

### Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua

Keuda, Kemendagri (2014) dalam situs resminya pada modul penerapan akuntansi berbasis akrua menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrua pada *Study* Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrua dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam *Study* Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrua akan dapat:

1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmentennya;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrua ini tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia.

### Strategi Penerapan SAP berbasis akrua

Upaya penerapan SAP berbasis akrua KSAP (2010) menjabarkan persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak

2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Strategi ini dilakukan oleh KSAP dengan harapan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik sehingga serta diharapkan agar seluruh instansi Pemerintah dapat mempraktikkan akuntansi berbasis akrual secara professional.

### **Penelitian Terdahulu**

Herlina (2010), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 (Studi empiris pada kabupaten nias selatan) dengan metode penelitian Eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan. Kusuma (2013), Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan (SAP) Berbasis Akrual (kasus pada Pemerintah Daerah Jember), Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam menganalisis kesiapan pemerintah terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah penelitian kualitatif interpretif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon yang bertempat di Jalan Slanag Kota Tomohon. Waktu Penelitian dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 -12 Februari 2015.

### **Metode Pengumpulan data**

#### **1. Observasi (Pengamatan).**

Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **2. Interview (Wawancara).**

Sugiyono (2009:317) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

#### **3. Dokumentasi**

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada Dinas Pendapatan Daerah.

## Metode Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian agar pengelolaan data dapat menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan fakta serta keadaan yang sebenarnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan DPPKBMD Kota Tomohon menyajikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas tahun anggaran 2013.

#### Neraca

Neraca merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir tahun anggaran. DPPKBMD Kota Tomohon mengumpulkan, menganalisis dan mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. DPPKBMD Kota Tomohon tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran DPPKBMD Kota Tomohon telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010. Tetapi karena basis akuntansi yang digunakan masih menganut kas menuju akrual (*cash towards accrual*), maka pengakuan pendapatan dan beban secara akrual belum diterapkan sehingga pemerintah DPPKBMD Kota Tomohon tidak menyajikan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Arus Kas DPPKBMD Kota Tomohon dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran tidak sesuai dengan klasifikasi peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP No. 3 ayat 15 yang membagi informasi Laporan Arus Kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris. Pos arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan belum sesuai dengan PSAP No.3 ayat 27 yang menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas tidak hanya untuk investasi aset tetap namun termasuk juga investasi lainnya yang terangkum dalam pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Setiap entitas pelaporan wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang memiliki potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan, maka harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik daerah Kota Tomohon menjelaskan mengenai pendahuluan, ekonomi makro, kebijakan akuntansi yang penting dan penjelasan pos-pos laporan keuangan telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4.

### **Proses Persiapan DPPKBMD Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Rata-rata pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Informan 1, selaku Kepala Bidang Akuntansi Kota Tomohon mengatakan bahwa:

Basis akrual digunakan untuk penyusunan laporan financial sedangkan basis kas digunakan untuk menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran. Pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh Informan 2, selaku pegawai/Staff akuntansi kota Tomohon mengatakan bahwa Jadi kalau akuntansi berbasis kas itu pengakuannya nanti setelah pada peristiwa/ transaksi itu terjadi pada saat kas diterima atau dibayar tapi kalau berbasis akrual tanpa memperhatikan peristiwa kas atau berdasarkan historis kejadian tapi tanpa memperhatikan kas masuk atau keluar.

Informan 3 juga mengatakan hal yang sama selaku Staff Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah bahwa:

Kalau dulu kan basis kas transaksi-transaksi yang dilakukan diakui saat ada penerimaan kas kemudian kalo penerapan PP No 71 Tahun 2010 yang akrual kan?nah akrual itu transaksi-transaksi langsung diakui walaupun belum ada penerimaan kas. Sama seperti yang dikatakan oleh Informan 4 selaku Kepala seksi Perencanaan BMD bahwa Kalau di BMD kalau basis kas transaksi-transaksi yang dilakukan dicatat saat ada penerimaan kas,tapi kalau sekarang transaksi-transaksi langsung dicatat walaupun belum ada penerimaan kas,pengertian sederhananya dari kami begitu. Pandangan responden di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

### **Kesiapan DPPKBMD terhadap penerapan SAP berbasis akrual**

Hasil pertanyaan dari peneliti kepada responden bagian Akuntansi dan BMD DPPKBMD yaitu apakah para responden sudah siap untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 para responden menjawab ya melalui pernyataan berikut:

Informan 5 mengatakan : Mau tidak mau harus siap. Pernyataan yang serupa juga dilontarkan oleh Informan 6 : Harus siap,karna ini peraturan jadi mau tidak mau harus diikuti. Begitu juga dengan pernyataan dari Informan 7 selaku Kepala Seksi Perencanaan BMD mengatakan bahwa:

Ya jelas, kalau kita siap atau tidak siap harus siap. Masalahnya ini amanat aturan.jadi harus dilaksanakan.

Informan 8 selaku Kepala Bidang BMD mengatakan bahwa: Kami siap untuk melaksanakannya. Informan 9 Kepala seksi Perencanaan BMD juga mengatakan bahwa: Harus siap pastinya untuk Kota Tomohon.

Pandangan beberapa responden di atas, menunjukkan bahwa untuk implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual hanyalah bentuk formalitas. Hal tersebut berangkat dari adanya peraturan pemerintah yang melandasi perubahan ini yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga

pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun responden lainnya menunjukkan optimisme terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Mereka memandang bahwa perubahan yang diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah tersebut merupakan keputusan yang tepat dan terbaik untuk kemajuan daerah.

### **Hambatan Yang Dihadapi DPPKBMD Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual**

Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pelatihan, tetap saja masih terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Ketika pelaksanaan basis akrual dalam pemerintahan Kota Tomohon diangkat dalam permukaan, masalah mengenai laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bertambah seolah-olah menjadi topik utama yang menjadikan basis akrual ini sebagai sesuatu hal yang sulit. Kendala yang masih harus dihadapi oleh DPPKBMD ini adalah masalah kesiapan sumber daya manusia. Mengingat bahwa peran dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yaitu selaku SKPKD yang merupakan pusat pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Tomohon yang tentunya bertanggungjawab atas setiap kesiapan-kesiapan yang ada di setiap SKPD di Kota Tomohon. Kendala-kendala yang di hadapi oleh DPPKBMD selaku SKPKD di paparkan pada pernyataan Informan 1 selaku Kepala Bagian Akuntansi bahwa:

Kendalanya di SDM...kami harus perlu bimbingan lagi. Kemudian pernyataan yang sama lagi di jabarkan oleh Informan 2 bahwa: Kendalanya di keuangan sini adalah tidak semua pegawai disini basic nya akuntansi jadi perlu adanya pelatihan-pelatihan. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Informan 3 selaku staff / pegawai bidang akuntansi Kota Tomohon yang Mengatakan bahwa: Kendala nya pastinya di SDM karna kami disini tidak semua latarbelakang pendidikan itu Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan, jadi perlu adanya sosialisasi lagi, kalau kendala-kendala lain kita lihat saja setelah evaluasi Laporan Keuangannya karna baru tahun ini diterapkan berbasis akrual.

Pernyataan para responden di atas menjelaskan bahwa SDM yang masih kurang menjadi masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual SDM. Terlihat jelas bahwa mereka memandang perubahan tentunya tidak mudah untuk diprediksi hasilnya di masa yang akan datang. Kendala utama adalah penempatan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

### **Pembahasan**

#### **Proses Persiapan DPPKBMD Terhadap Penerapan SAP berbasis akrual**

Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten sudah menerapkan akuntansi kas menuju akrual berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. Dalam penetapannya pemerintah telah melakukan berbagai macam persiapan yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, sampai kota/kabupaten. DPPKBMD Kota Tomohon juga telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam proses sosialisasi ini beberapa Staff telah mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP dan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pada bulan September 2014 juga telah diselenggarakan bimbingan teknis aplikasi SIMDA berbasis akrual bagi para pejabat pengelola keuangan daerah. Sosialisasi ini dilakukan mulai dengan melakukan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual kemudian perbedaan akuntansi kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual, sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual. Sosialisasi ini juga disertai dengan bimbingan teknis pada pegawai dengan mempraktekkan secara langsung cara penginputan transaksi melalui simulasi. Pemerintah juga menyediakan software yang mendukung metode pencatatan akuntansi berbasis akrual ini yaitu SIMDA. Secara keseluruhan DPPKBMD Kota Tomohon tidak memiliki hambatan terhadap penggunaan software ini karena pada saat sosialisasi seluruh staf akuntansi di DPPKBMD sudah mendapat bimbingan teknis untuk penggunaan software ini.

### **Kesiapan DPPKBMD Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Pandangan beberapa responden menunjukkan bahwa untuk implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual hanyalah bentuk formalitas. Hal tersebut berangkat dari adanya peraturan pemerintah yang melandasi perubahan ini yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun pernyataan responden lain menunjukkan optimisme terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Mereka memandang bahwa perubahan yang diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah tersebut merupakan keputusan yang tepat dan terbaik untuk kemajuan daerah. Optimisme kesiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual ini, merupakan optimisme sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Hasil dari pernyataan diatas DPPKBMD selaku SKPKD adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam sosialisasi penerapan akuntansi berbasis akrual di seluruh SKPD-SKPD belum memiliki kesiapan karena terdapat hambatan dalam penempatan sumber daya manusia yang tidak tepat berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) yaitu kesiapan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh kesiapan SDM yang siap.

### **Hambatan yang dihadapi DPPKBMD dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Pernyataan para responden menjelaskan bahwa SDM yang masih kurang menjadi masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual SDM. Hal ini Terlihat jelas bahwa mereka memandang perubahan tentunya tidak mudah untuk diprediksi hasilnya di masa yang akan datang. Kendala utama bukan karna jumlah SDM yang kurang melainkan Kualitas SDM yang belum mampu dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Para responden memberikan respon terhadap perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan dengan memandang bahwa aturan baru akan lebih rumit dan tidak sesuai dengan kompetensi SDM Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Hal ini merupakan penghambat kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual karena butuh waktu lama untuk belajar tentang akuntansi berbasis akrual ini. inilah yang menjadi penyebab kesulitan dari penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah diperlukan untuk menyediakan SDM-SDM yang memiliki dasar pendidikan akuntansi dalam di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pemerintah bukan hanya memfokuskan proses sosialisasi tetapi juga harus memiliki perhatian terhadap ketersediaan dana yang digunakan untuk sosialisasi. Karena, pada dasarnya pemerintah seharusnya sudah bisa memperhitungkan kecukupan dana untuk proses sosialisasi terhadap kesiapan SAP berbasis akrual dan mengantisipasi kekurangan dana untuk sosialisasi ini sehingga pemerintah berfokus pada hambatan-hambatan yang tidak terduga pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian terhadap kesiapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah atau yang di singkat DPPKBMD Kota Tomohon terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015 penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam proses persiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual pada akuntansi berbasis akrual kemudian perbedaan kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam kesiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual belum memiliki kesiapan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon memiliki hambatan dalam penerapan SAP berbasis akrual karna penempatan SDM yang kurang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

## Saran

Hasil penelitian terhadap kesiapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah atau yang di singkat DPPKBMD Kota Tomohon terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015 penulis memberikan saran yaitu :

1. DPPKBMD Kota Tomohon dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebaiknya dalam penempatan SDM harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.
2. Bagi pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon perlu melakukan pendidikan dan pelatihan langsung mengenai peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, agar kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Herlina, Hetti. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP No 71 Tahun 2010*. Universitas Negeri Padang. Padang.  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1>  
Tanggal akses 9 Nopember 2014. Hal. 94.
- Keuda. Kemendagri. 2014. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual*. Google, Jakarta Pusat.  
<http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>. Tanggal Akses 12 Januari 2015.
- Kusuma, Yudha. 2010. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerspksn Standr Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Universitas Diponegoro. Semarang.  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1>  
Tanggal akses 9 Desember 2014. Hal. 94.
- KSAP.2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat, Jakarta.
- KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk LimitedHearing*, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.